



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pidie Tahun 2023-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah- langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan standar pelayanan minimal.

2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
3. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
15. Pemerintah Kabupaten Pidie adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
18. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- b. integrasi SPM;
- c. strategi Penerapan SPM;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, terdiri dari:



- a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
 - (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB IV INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK.
- (2) Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBK dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB V
STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku Anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Sistematika Renaksi Penerapan SPM memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM berupa:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. Tahun dasar pelaksanaan;
 - d. Pencapaian SPM;
 - e. Inisiasi;
 - f. Sumber pendanaan; dan
 - g. Instansi pelaksana.
- (8) Rencana Aksi dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program dan Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBK tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dapat menganggarkan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan badan usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM.

- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pidie yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII KETENTUAN ENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 45 Tahun 2025

Tanggal : 21 November 2025 M

30 Jumadil Awal 1447 H

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Pidie menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

2.2.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Pidie merupakan bagian dari Pemerintah Aceh, yang terletak pada posisi antara $04,30^{\circ}$ - $04,60^{\circ}$ Lintang Utara dan $95,75^{\circ}$ - $96,20^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pidie berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 318.444,77 Ha, yang terdiri dari 23 kecamatan, 97 kemukiman dan 730 gampong, Sebelumnya Kabupaten Pidie hanya memiliki 727 Gampong yang Definitif, akan tetapi setelah diterbitkannya keputusan Menteri Dalam Negeri no. 140-9756 tahun 2016 tentang nama, kode dan jumlah desa, maka bertambah 3 Gampong yang telah definitif yakni Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse, Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga dan Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee.

Kabupaten Pidie memiliki beberapa Kecamatan yang terletak di wilayah dataran tinggi seperti Geumpang, Tangse, Mane, Tiro/Truseb dan Muara Tiga. Terdapat beberapa kawasan yang masuk dalam kategori kawasan pergunungan, pedalaman dan terpencil pada 7 Kecamatan dimaksud. Kondisi insfrastruktur didaerah tersebut selalu ditingkatkan, sehingga masyarakat pada kawasan tersebut dalam menjalankan aktivitas dengan lancar khususnya kegiatan perekonomian dan pertolongan keselamatan. Sedangkan beberapa kawasan yang masuk dalam kawasan pesisir yaitu kawasan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong.

Wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 39.845,37 Ha, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, meliputi:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat dan Aceh Tengah;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Barat dan Aceh Tengah;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Pidie Jaya dan Bireuen ; dan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Dari posisi tersebut, wilayah ini membuka ke arah Selat Malaka dimana 6 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada memiliki garis pantai menghadap ke Selat Malaka. Kecamatan yang menghadap ke Selat Malaka adalah Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli,

Simpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong.

2.2.2. Topografi

Berdasarkan kelas ketinggian, Kabupaten Pidie didominasi oleh kelas ketinggian 100–500 mdpl sebesar 23,86%. Kelas ketinggian yang paling rendah adalah kelas dengan ketinggian 0-25 mdpl sebesar 3,68% dan ketinggian 1.000-1.500 mdpl adalah 0% dari luas wilayah Kabupaten Pidie. Berdasarkan kondisi eksisting serta potensi yang ada di Kabupaten Pidie, komoditi yang dominan berada pada kawasan yang elevasi ketinggian datar dan sebagian kecil pada elevasi ketinggian 500-1200 mdpl. Ketinggian menurut kecamatan di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.I
Ketinggian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie

No.	Kecamatan	Ketinggian (mdl)					
		0-3	3-25	25-100	100-500	500-1000	1000 - 1500
1	Batee	25,26	29,42	8,20	9,04	2,48	
2	Delima		10,48	25,56	7,28		
3	Geumpang			19,42	114,43	159,62	167,73
4	Glumpang Tiga		25,40	29,51	2,28		
5	Indrajaya		2,50	20,50			
6	Kembang Tanjong	18,87	7,13				
7	Kota Sigli	5,90					
8	Mila		13,57	6,15	5,28		
9	Muara Tiga	15,43	16,65	13,36	7,64	7,62	
10	Mutiara		22,57	7,54			
11	Padang Tiji		15,03	169,97	45,96	10,64	
12	Peukan Baro		12,07	4,93			
13	Pidie	27,67	5,33				
14	Sakti		23,47	9,80	7,03		
15	Simpang Tiga	20,45	4,55				
16	Tangse			59,69	198,53	269,33	284,15
17	Tiro/Truseb		21,61	32,59	58,24	8,23	1,23
18	Keumala						
19	Mutiara Timur		29,27	29,51	7,19	1,22	
20	Grong-grong		8,38	22,83	1,97		
21	Mane			37,73	264,54	43,90	270,53
22	Glumpang baro		13,56	9,23	1,12		
23	Titeue		25,92	16,46	5,95	0,37	
Jumlah/Rata-Rata		113,58	286,91	522,98	736,48	703,41	723,64

Sumber: RTRWK Pidie Tahun 2014-2034,

Kemiringan lereng merupakan kondisi fisik suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan

lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi kemiringan lereng berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan.

Untuk lebih jelasnya karakteristik tiap kemiringan lereng dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kelerengan 0%-5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
2. Kelerengan 5%-10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 10%-30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang. Daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih besar.
4. Kelerengan >30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Kemiringan lereng wilayah sangat bervariasi, yaitu datar sampai bergunung. Umumnya luas wilayah menurut kelas lereng hampir berimbang. Kelas lereng datar dengan kemiringan 0-15% sebesar 23,53 Ha (25,57%) terdapat di bagian utara (sepanjang garis pantai Selat Malaka). Keadaan menggambarkan penggunaan tanah di wilayah ini adalah usaha pertanian lahan basah, tambak, tegalan dan sebagian berupa hutan. Daerah yang berlereng bergunung sampai terjal, yaitu wilayah pada kemiringan 25->40% terdapat di bagian selatan dengan jumlah luas 22,47 Ha (7,28%) yang umumnya berupa hutan.

2.2.3. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Pidie terdapat berbagai sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pertanian, rumah tangga, industri dan lain sebagainya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sumber daya air, perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan yaitu sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pidie semuanya berhulu di dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Terdapat 2 buah Daerah Aliran sungai (DAS) yang cukup besar, yaitu DAS Krueng Baro dan Krueng Tiro.

Apabila dilihat dari bentuk pola alirannya, maka sungai-sungai yang mengalir berbentuk sub-paralel dengan ciri-ciri pola aliran pada wilayah yang bergunung, yang terbentuk pada lereng dari suatu jalur pegunungan. Keadaan sungai-sungai tersebut sebagian ada yang terkena erosi sehingga mengakibatkan lingkungan rusak. Kabupaten Pidie memiliki 26 sungai dan 27 waduk. Secara keseluruhan kualitas

air sungai di Kabupaten Pidie relatif cukup baik.

2.2.4. Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Daya guna dari modal tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya. Penduduk merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada akhir Juni 2022 mencapai 436.796 jiwa. Terdiri laki-laki 215.028 jiwa dan perempuan 211.768 jiwa.

2.2.5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang meliputi daerah rawan erosi, daerah rawan banjir sudah termasuk pada kawasan sempadan sungai dan daerah rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Pidie antara lain kawasan rawan banjir, longsor, angin puting beliung, gempa bumi, lahar dan abu gunung berapi dan tsunami.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan rawan longsor di Kabupaten Pidie, faktor yang sangat mempengaruhi terhadap waktu kejadian longsor adalah curah hujan (air) yang menjenuhi tanah penutup yang sangat tebal. Oleh karena itu longsor sering terjadi pada musim hujan. Adapun kawasan yang berpotensi terhadap bencana longsor meliputi Kecamatan Geumpang, Mane, Tangse, Tiro/Truseb, Titeu, Keumala, Geulumpang Tiga;
2. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pidie, meliputi Kecamatan Padang Tiji, Grong-Grong, Batee, Pidie, Indra Jaya, Mila, Keumala, Delima, Sakti, Mutiara Timur, Mutiara, Simpang Tiga, Peukan Baro, Geulumpang Tiga, Geulumpang Baro, Tiro/truseb, Kembang Tanjong dan Tangse.
3. Kawasan rawan angin puting beliung bahaya tinggi di Kabupaten Pidie yang sebarannya meliputi Kecamatan Sakti, Mutiara, Mila, Kembang Tanjong, Indra Jaya, Peukan Baro, Muara Tiga, Batee dan Simpang Tiga.

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Pidie berupa kawasan cagar alam geologi. Adapun Kawasan cagar alam geologi yang ada hanya berupa kawasan rawan bencana alam geologi.

Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:

- Kawasan Gempa Bumi

Gerakan tanah merupakan jenis bencana alam geologi yang mungkin terjadi di Kabupaten Pidie yaitu berupa bencana alam gempa bumi, kawasan yang berpotensi terhadap rawan bencana gempa bumi tektonik tinggi, meliputi Kecamatan Mane, Tiro/Truseb, Titeue, Keumala, Tangse, Sakti, Mila dan Padang Tiji;

- Kawasan Rawan Lahar dan Abu Gunung Berapi

Kawasan rawan lahar dan abu gunung berapi di Kabupaten Pidie tersebar menurut zonasinya yaitu:

- Hazard Zone 1: Kecamatan Geumpang, dan Kecamatan Mane.
- Hazard Zone 2: Kecamatan Geumpang.
- Hazard Zone 3: Kecamatan Geumpang.

- Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami di Kabupaten Pidie, kawasan yang berpotensi tsunami khususnya terjadi pada kawasan pesisir pantai meliputi: Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Pidie yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kota/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Pidie 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pidie	7.411	16.269	45,55%	46,306	47,958	96,55%	130	130	100%	416.095.420.067	-

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten / Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Pidie	8.890	5.865	66%	8.486	6.841	81%	8.082	6.850	85%	30.439	23.509	77%	71.675	57.524	80%	294.651	143.505	49%	47.001	39.497	84%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.						
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran		
77.202	24.519	32%	10.931	7.912	72%	962	853	89%	7.037	4.735	67%	10.493	7.508	72%	12,080,038,330			

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pidie	113,276	113,276	100	113,276	113,276	100	12,765,453,196	-

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pidie	21	11	52%	9	9	100%	48,959,021	-

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pidie	435,797	435,797	100%	435,797	435,797	100%	435,797	435,797	100%	435,797	435,797	100%	435,797	421,323	96.68 %	6,428,816,975	

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

3 Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Pidie Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pidie	996	996	100%	996	996	100%	996	996	100%	996	996	100%	306	306	100%	778,618,604	

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pidie ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pidie ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Berikut adalah beberapa kendala dalam pelaksanaan penerapan SPM Pendidikan tahun 2022.

- a. Masih belum terbangunnya sistem Pendataan pendidikan yang baik untuk mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag, serta data kependudukan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dampak dari inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dalam memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara maksimal karena belum teranggarkan secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2022;
- c. Verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah terhenti karena pandemi Covid-19, sehingga data base kependudukan yang terintegrasi dengan data Pendidikan belum tersedia;
- d. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen PNS yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan SPM Pendidikan.

2.2.2. Bidang Kesehatan

Pada proses penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan tahun 2022 masih banyak permasalahan dan kendala yang Dinas Kesehatan hadapi yang menyebabkan jenis pelayanan dasar belum mencapai target. Berikut uraian tentang permasalahan dan solusi yang mungkin dapat dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang terhadap pencapaian SPM Kesehatan seperti pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p>Sasaran estimasi lebih tinggi dari data real dilapangan</p> <p>Banyak yang tidak melaporkan kehamilan dan langsung memeriksakan diri ke Dokter spesialis</p>	<p>Sosialisasi Intenatal Terpadu</p>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p>Sasaran estimasi lebih tinggi dari data real dilapangan</p> <p>Banyak yang tidak melaporkan Kehamilan dan langsung memeriksakan diri ke Dokter spesialis</p>	<p>Penertiban Kartu Keluarga</p>
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	<p>Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan di luar kab/luar kota</p>	<p>Pemamfaatan Buku KIA</p>
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<p>Ibu melahirkan mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kab/luar kota</p>	<p>Orientasi SDIDTK dan Kelas Ibu Balita</p>
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<p>Sasaran estimasi lebih tinggi dari data real</p> <p>Pada saat dilakukan pemeriksaan ada siswa yang tidak masuk sekolah</p>	<p>Melakukan sweeping penjangangan dan pemeriksaan berkala pada siswa</p>
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<p>Sasaran estimasi lebih tinggi dari data real</p> <p>Masyarakat posbindu berpersepsi posbindu hanya untuk perempuan</p> <p>Usia Produkrtif sebagian besar pekerja dan mahasiswa</p>	<p>Melakukan Kie tentang Faktor PTM</p> <p>Integrasi dengan Program lain</p>
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>Sasaran estimasi lebih tinggi dari data real</p> <p>Lansia enggan datang ke Posyandu lansia karena tidak ada obat</p>	<p>Membuat Posbindu Khusus/Posb indu Intitusi</p> <p>Melakukan KIE terhadap lansia tentang pentingnya skrining factor resiko penyakit tidak menular</p>

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita tidak berkunjung ke posbindu/ puskesmas melainkan ke fasilitas kesehatan lain/swasta	Melakukan kunjungan rumah melalui program PIS-PK Meminta data ke pelayanan kesehatan swasta KIE tentang Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus (DM) tidak berkunjung ke Posbindu/ Puskesmas tetapi ke fasilitas kesehatan swasta	Pendataan penderita Diabetes Melitus KIE tentang diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Kepedulian Keluarga dan masyarakat sekitar terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat masih kurang sehingga masih banyak ODGJ yang terlantar dan tidak mendapatkan pelayanan termasuk obat-obatan	Melakukan pelayanan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam perawatan ODGJ Melakukan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Rendahnya Pencapaian terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Koordinasi antara petugas kesehatan dan kader desa untuk KIE penyakit TBC kepada terduga TB/masyarakat

			<p>Tingkatkan kegiatan skrining penyakit TBC ditempat tempat khusus (asrama, pondok pasantren)</p> <p>Fassyankes dengan wilayah yang ada DPM wajib ternotifikasi di program</p>
12	<p>Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</p>	<p>Rendahnya penemuan kasus HIV/AIDS pada kelompok resiko</p>	<p>Tingkat penyuluhan HIV/AIDS pada kelompok resiko dimasyarakat dan populasi kunci</p> <p>Tingkat kegiatan skrining HIV/AIDS pada kelompok resiko dan populasi kunci</p> <p>Menjalin kerjasama dengan penjangkau dalam hal akses kelompok resiko dan populasi kunci</p> <p>Surpervisi dan monitoring ke FKTP</p>

2.2.3. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Beberapa masalah yang timbul adalah:

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- g. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- h. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun

2.2.4. Bidang Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditempuh.

Dalam pelaksanaan SPM sub urusan penanggulangan bencana dan kebakaran ditemui beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai
2. Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan
3. Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat bencana masih rendah
4. Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi
5. Kurang/ minimnya dukungan Anggaran/ pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga
6. Belum memadainya/ masih kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

7. Dikarenakan luas wilayah kabupaten pidie dengan 23 kecamatan, maka untuk mencapai resptime 15 menit yang maksimal masih diperlukan tambahan 2 pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), sehingga ke depan perlu menambah kekurangan tersebut.
8. Kondisi kepadatan lalu lintas, lebar ruas jalan, akses jalan masuk kendaraan Pemadam Kebakaran yang menghambat mobilitas menuju lokasi kejadian kebakaran sehingga ke depan akses masuk kendaraan Pemadam Kebakaran perlu dibuka agar memudahkan kendaraan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kejadian kebakaran.
9. Penambahan armada pemadam kebakaran.
10. Personil yang ada belum memenuhi standar minimal kebutuhan pada setiap pos WMK dan kualifikasi minimal setiap personil sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan sesuai standar.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditempuh.

Dalam pelaksanaan SPM sub urusan Trantibmumlinmas ditemui beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam formalitas struktur
2. Kurangnya pemahaman dalam Perencanaan Strategis, Taktik dan Operasional
3. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terhadap kegiatan lapangan
4. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu
5. Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggungjawab bidang Trantibmumlinmas masih tinggi
6. Kurang/minimnya dukungan Anggaran/pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
7. Masih kurang sarana dan Prasarana
8. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi
9. Perbedaan dalam orientasi waktu
10. Personil yang ada belum memenuhi standar minimal kebutuhan pada setiap pos minimal setiap personil dibekali pendidikan dan pelatihan sesuai standar

2.2.5. Bidang Sosial

Beberapa kendala yang dihadapi dinas Sosial dalam Penerapan SPM Bidang Sosial diantaranya:

- a. Dalam Penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pidie belum memiliki Qanun Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
- b. Terbatasnya anggaran untuk penerapan SPM sehingga kegiatan SPM Kabupaten/Kota belum bisa dilaksanakan secara maksimal

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 Spm Urusan Pendidikan

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie melaksanakan 3 (tiga) SPM yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pelayanan pendidikan Kesetaraan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PENDIDIKAN

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi sekolah PAUD	1 Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2 Pembangunan unit sekolah baru	unit
			3 Pembangunan ruang kelas baru	unit
			4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
			5 Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	unit
			6 Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
			7	Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Peserta didik	
			8	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	pendidik	
		Literasi dan numerasi PAUD	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		Kualitas PAUD	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/ atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Guru	
			4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			5	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			6	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			7	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Unit	
			8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Peserta didik	
		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	1	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		Program SPM Pendidikan Dasar	Angka partisipasi sekolah (SD/SMP)	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
				2	Pembangunan unit sekolah baru	unit
				3	Pembangunan ruang kelas baru	unit
				4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
5	Pengadaan perlengkapan peserta didik			Peserta didik		
6	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar			Peserta didik		

	Literasi dan numerasi (SD/SMP)	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
--	--------------------------------	---	---	----------------------------------

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			4	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			6	Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			7	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			9	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			10	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			11	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Peserta didik
		Iklim (SD/SMP)	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2	Pembangunan unit sekolah baru	Unit
			3	Pembangunan ruang kelas baru	Unit

		4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Unit
--	--	---	--	------

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta Didik
			6	Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Peserta didik
		Iklim (Kesetaraan)	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

3.1.2 SPM URUSAN KESEHATAN

Dalam penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie melaksanakan 12 (dua belas) SPM yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
10. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
11. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
TERCAPAINYA SPM URUSAN KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
	masyarakat	Daerah Kabupaten/ Kota	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3 SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pidie, melaksanakan 2 (dua) SPM yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
TERCAPAINYA SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pidie, melaksanakan 2 (dua) SPM yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
TERCAPAINYA SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Dokumen	
3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Dokumen	
4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			Dokumen	
5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen	
6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM URUSAN TRANTIBUM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie melaksanakan 1 (satu) SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	2		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
	3		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
		Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh	1	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	dokumen
			2	Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	laporan
			3	Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	laporan
			4	Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	laporan
			5	Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayahul hisbah kabupaten/kota	laporan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			6 Bimbingan teknis bagi polisi wilayahul hisbah aceh dan kabupaten/kota	laporan
			7 Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	laporan
			8 Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	
			9 Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim	laporan
			10 Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Dokumen
			11 Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Laporan

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie melaksanakan 4 (empat) SPM yaitu :

- Pelayanan Informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.6
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen	
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
				2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
		4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		5		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		6		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
3	Program pencegahan	Pencegahan, Pengendalian	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

	penanggulangan,	Pemadaman,			
--	-----------------	------------	--	--	--

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
	penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
				2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
				2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
		3		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM URUSAN SOSIAL

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Sosial, , melaksanakan 5 (lima) SPM yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.7
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN SOSIAL

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program rehabilitasi social	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang

		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Pidie 2023-2027

Tabel 3.8

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	7.345	Orang						-		Disdikbud						-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi sekolah	60,33	%	16.568	9.995	6.573	60,33	2.441.979.986	-	DAU, DOKA, DAK	Disdikbud	16.768		16.768	0,00%		-	APBK	Disdikbud
2	Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B	47	%	90	57	33	63,33	4.658547000	-	DAK Non Fisik	Disdikbud	90		90	0,0 0%		-	APBK	Disdikbud
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	60,3	%	827	528	299	63,85		-	APBK	Disdikbud	830		830	0,00%		-	APBK	Disdikbud
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	4	%	4	4	0	100		-	APBK	Disdikbud	4		4	0,00%		-	APBK	Disdikbud
5	Kecukupan formasi guru ASN	98,6	%	30	26	4	86,67		-			31,00		31,00	0,00%		-		
6	Indeks distribusi guru	0,03	%	0		0,45	0,45		-	APBK	Disdikbud	0,20		0,20	0,00%		-	APBK	Disdikbud
7	Proporsi PTK bersertifikat	9,20	%	0,10	0,03	0,07	30		-	APBN	Disdikbud	12,00		12,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
8	Proporsi PTK penggerak	0,42	%	1	0,42	0,58	42,00		-	APBN/ APBK	Disdikbud	2,00		2,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
9	Pengalaman pelatihan guru	0,12	%	1,17	0,12	1,05	10,26		-			1,37		1,37	0,00%		-		
2)	Pendidikan Dasar	46.861	Orang																
	SD	95,89	%	4.904	4.904				-	APBK	Disdikbud	48.488		48.488	0,00%		-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	113,70	%	48,28	46,30	1,9	95,89		-	APBK	Disdikbud	48.488		48.488	0,00%		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	87,46	%	48,28	54,9	6,6	113	RP 17.034.751.571	-	APBK	Disdikbud	48.488		48.488	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	99,98	%	48,28	42,23	6	87		-	APBK	Disdikbud	54,87		54,87	0,00%		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	99,98	Nilai	51,87	51,86	0,01	99,98	Rp. 2.961.212.650	-	APBK	Disdikbud	43,90		43,90	0,00%		-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	99,95	Nilai	40,90	40,88	0,02	99,95		-	APBK	Disdikbud	3,00		3,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Perbedaan skor literasi	99,26	Nilai	1,35	1,34	0,01	99,26		-	APBK	Disdikbud	3,00		3,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	99,30	Nilai	7,15	7,10	0,05	99,30%		-	APBK	Disdikbud	3,00		3,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan	99,90	Nilai	67,90	67,83	0,07	99,90%		-	APBK	Disdikbud	70,90		70,90	0,00%		-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan	99,92	%	60,10	60,05	0,05	99,92%		-	APBK	Disdikbud	63,10		63,10	0,00%		-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas	99,92	%	60,10	60,05	0,05	99,92%		-	APBK	Disdikbud	63,10		63,10	0,00%		-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN	99,89	%	65,10	65,03	0,07	99,89%		-	APBK	Disdikbud	68,10		68,10	0,00%		-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru	71	%	1,00	0,71	0,29	71,00%		-	APBK	Disdikbud	1,00		1,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat	99,89	%	88,50	88,40	0,1	99,89%		-	APBN	Disdikbud	89,50		89,50	0,00%		-	APBK	Disdikbud
14	Proporsi PTK penggerak	93,33	%	0,30	0,28	0,02	93,33%	Rp. 297.381.714	-	APBK	Disdikbud	0,40		0,40	0,00%		-	APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru	99,40	%	16,80	16,70	0,1	99,40%		-	APBK	Disdikbud	19,80		19,80	0,00%		-	APBK	Disdikbud
	SMP	21,985	Orang						-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	89,78	%	24.378	21.886	2.492	89,78%	9.349.015.382	-	APBK	Disdikbud	24.578		24578	0,00%		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	99,12	%	24.378	24.853	475	101,95%		-	APBK	Disdikbud	24.578		24578	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	41,28	%	24.378	10.064	14.314	41,28%		-	APBK	Disdikbud	24.578		24578	0,00%		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	99,96	Nilai	46,80	46,78	0,02	99,96%	314.999.740	-	APBK	Disdikbud	49,80		49,80	0,00%		-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	99,37	Nilai	33,50	33,29	0,21	99,37%		-	APBK	Disdikbud	36,50		36,50	0,00%		-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi	92	Nilai	3,00	2,76	0,24	92,00%		-	APBK	Disdikbud	3,00		3,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	91,67	Nilai	0,12	0,11	0,01	91,67%		-	APBK	Disdikbud	1,00		1,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan	98,91	Nilai	66,00	65,28	0,72	98,91%	375.000.000	-	APBK	Disdikbud	68,00		68,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan	99,67	%	60,00	59,80	0,2	99,67%		-	APBK	Disdikbud	62,00		62,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas	99,67	%	66,00	65,03	0,97	98,53%		-	APBK	Disdikbud	68,00		68,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN	98,58	%	1,00	0,71	0,29	71,00%		-	APBK	Disdikbud	1,00		1,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru	71	%	92,00	91,45	0,55	99,40%		-	APBK	Disdikbud	93,00		93,00	0,00%		-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat	99,40	%	0,30	0,27	0,03	90,00%	835.293.227	-	APBK	Disdikbud	0,50		0,50	0,00%		-	APBK	Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Proporsi PTK penggerak	90	%	44,50	44,10	0,4	99,10%		-	APBK	Disdikbud	0,50		0,50	0,00%		-	APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru	44	%						-	APBK	Disdikbud	46,50		46,50	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3)	Pendidikan Kesetaraan	130	Orang						-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	0,00	%	92.663		92.663	0,00%		-	APBK		92.863		92863	0,00%				
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	0,80	%	92.663	743	91.920	0,80%	2.193.000.000	-	DAU	Disdikbud	92.863		92863	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	0,00		92.663		92.663	0,00%		-		Disdikbud	92.863		92863	0,00%			APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	0,00		50,00	49,03	0,97	98,06%	508.350.000	-	DAU	Disdikbud	52,00		52,00	0,00%			APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	0,00		45,00	43,84	1,16	97,42%		-		Disdikbud	47,00		47,00	0,00%			APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi	0,00				0	0		-	APBK	Disdikbud			0	0			APBK	
7	Perbedaan skor numerasi	0,00				0	0		-	APBK	Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan	0,00		70,00	65,90	4,1	94,14%		-	APBK	Disdikbud	72,00		72,00	0,00%			APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0,00		60,00	58,25	1,75	97,08%		-	APBK	Disdikbud	62,00		62,00	0,00%			APBK	Disdikbud
10	Kecukupan formasi guru ASN	0,00				0	0		-	APBK	Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud
11	Indeks distribusi guru	0,00				0	0		-	APBK	Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud
12	Proporsi PTK bersertifikat	0,00				0	0		-	DAU	Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK penggerak	0,00				0	0	33.387.298	-		Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud
14	Pengalaman Pelatihan Guru	0,00				0	0		-		Disdikbud			0	0			APBK	Disdikbud

Lanjutan Tabel 3.8

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Inisiasi	Pencapaian SPM (2026)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Inisiasi	Pencapaian SPM (2027)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2 Kabupaten/Kota	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pendidikan Anak Usia Dini						-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi sekolah	16.968		16968	0,00%		-	APBK	Disdikbud	17.168		17168	0,00%		-	APBK	Disdikbud	17.368		17368	0,00%		-	APBK	Disdikbud
2	Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B	90		90	0,00%		-	APBK	Disdikbud	90		90	0,00%		-	APBK	Disdikbud	90		90	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di SI/DIV	833		833	0,00%		-	APBK	Disdikbud	836		836	0,00%		-	APBK	Disdikbud	839		839	0,00%		-	APBK	Disdikbud
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	4		4	0,00%		-	APBK	Disdikbud	4		4	0,00%		-	APBK	Disdikbud	4		4	0,00%		-	APBK	Disdikbud
5	Kecukupan formasi guru ASN	32,00		32	0,00%		-	APBK	Disdikbud	33,00		33	0,00%		-	APBK	Disdikbud	34,00		34	0,00%		-	APBK	Disdikbud
6	Indeks distribusi guru	0,30		0,3	0,00%		-	APBK	Disdikbud	0,40		0,4	0,00%		-	APBK	Disdikbud	0,50		0,5	0,00%		-	APBK	Disdikbud
7	Proporsi PTK bersertifikat	14,00		14	0,00%		-	APBN	Disdikbud	16,00		16	0,00%		-	APBK	Disdikbud	18,00		18	0,00%		-	APBN	Disdikbud
8	Proporsi PTK penggerak	3,00		3	0,00%		-	APBN/APBK	Disdikbud	4,00		4	0,00%		-	APBK	Disdikbud	5,00		5	0,00%		-	APBN/APBK	Disdikbud
9	Pengalaman pelatihan guru	1,57		1,57	0,00%		-			1,77		1,77	0,00%		-			1,97		1,97	0,00%		-		
2)	Pendidikan Dasar							APBK	Disdikbud							APBK	Disdikbud							APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	48.688		48688	0,00%		-	APBK	Disdikbud	48.888		48888	0,00%		-	APBK	Disdikbud	49.088		49088	0,00%		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	48.688		48688	0,00%		-	APBK	Disdikbud	48.888		48888	0,00%		-	APBK	Disdikbud	49.088		49088	0,00%		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	48.688		48688	0,00%		-	APBK	Disdikbud	48.888		48888	0,00%		-	APBK	Disdikbud	49.088		49088	0,00%		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	57,87		57,87	0,00%		-	APBK	Disdikbud	60,87		60,87	0,00%		-	APBK	Disdikbud	63,87		63,87	0,00%		-	APBK	Disdikbud

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
1	2	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Kemampuan numerasi	46,90	46,9	0,00%		-	APBK	Disdikbud	49,90	49,90	0,00%			-	APBK	Disdikbud	52,90	52,90	0,00%			-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi	3,00	3	0,00%		-	APBK	Disdikbud	3,00	3,00	0,00%			-	APBK	Disdikbud	3,00	3,00	0,00%			-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	3,00	3	0,00%		-	APBK	Disdikbud	3,00	3,00	0,00%			-	APBK	Disdikbud	3,00	3,00	0,00%			-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamananan	73,90	73,9	0,00%		-	APBK	Disdikbud	76,90	76,90	0,00%			-	APBK	Disdikbud	79,90	79,90	0,00%			-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan	66,10	66,1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	69,10	69,10	0,00%			-	APBK	Disdikbud	79,90	79,90	0,00%			-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas	66,10	66,1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	69,10	69,10	0,00%			-	APBK	Disdikbud	72,10	72,10	0,00%			-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN	71,10	71,1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	74,10	74,1	0,00%			-	APBK	Disdikbud	77,10	77,1	0,00%			-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru	1	1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	1	1	0,00%			-	APBK	Disdikbud	1	1	0,00%			-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat	90,50	90,5	0,00%		-	APBN	Disdikbud	91,50	91,5	0,00%			-	APBK	Disdikbud	92,50	92,5	0,00%			-	APBN	Disdikbud
14	Proporsi PTK penggerak	0,50	0,5	0,00%		-	APBN/A PBK	Disdikbud	0,60	0,6	0,00%			-	APBK	Disdikbud	0,70	0,7	0,00%			-	APBN/APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru	22,80	22,8	0,00%		-	APBN/A PBK/OT SUS	Disdikbud	25,80	25,8	0,00%			-	APBK	Disdikbud	28,80	28,8	0,00%			-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud
	SMP					-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	24,778	24,778	0,00%		-	APBK	Disdikbud	24,978	24,978	0,00%			-	APBK	Disdikbud	25,178	25,178	0,00%			-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	24,778	24,778	0,00%		-	APBK	Disdikbud	24,978	24,978	0,00%			-	APBK	Disdikbud	25,178	25,178	0,00%			-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	24,778	24,778	0,00%		-	APBK	Disdikbud	24,978	24,978	0,00%			-	APBK	Disdikbud	25,178	25,178	0,00%			-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	52,80	52,8	0,00%		-	APBK	Disdikbud	55,80	55,8	0,00%			-	APBK	Disdikbud	58,80	58,8	0,00%			-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	39,50	39,5	0,00%		-	APBK	Disdikbud	42,50	42,5	0,00%			-	APBK	Disdikbud	45,50	45,5	0,00%			-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi	3,00	3	0,00%		-	APBK	Disdikbud	3,00	3	0,00%			-	APBK	Disdikbud	3,00	3	0,00%			-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	1,00	1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	1,00	1	0,00%			-	APBK	Disdikbud	1,00	1	0,00%			-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamananan		70	0,00%		-	APBK	Disdikbud	72,00	72	0,00%			-	APBK	Disdikbud		74	0,00%			-	APBK	Disdikbud

	70,00													74,00							
liman	64,00	64	0,00%		-	APBK	Disdikbud	66,00	66	0,00%		-	APBK	Disdikbud	74,00	74	0,00%		-	APBK	Disdikbud
as	64,00	64	0,00%		-	APBK	Disdikbud	72,00	72	0,00%		-	APBK	Disdikbud	74,00	74	0,00%		-	APBK	Disdikbud
an uru	70,00	70	0,00%		-	APBK	Disdikbud	74,00	74	0,00%		-	APBK	Disdikbud	74,00	74	0,00%		-	APBK	Disdikbud

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM (2027)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi		
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
1	Indeks distribusi guru	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
12	Proporsi PTK bersertifikat	1,00		1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	1,00		1	0,00%		-	APBK	Disdikbud	1,00	1	0,00%				APBK	Disdikbud	
13	Proporsi PTK penggerak	94,00		94	0,00%		-	APBN	Disdikbud	95,00		95	0,00%		-	APBK	Disdikbud	96,00	96	0,00%				APBK	Disdikbud	
14	Pengalaman pelatihan guru	0,70		0,7	0,00%		-	APBN/ APBK	Disdikbud	0,90		0,9	0,00%		-	APBK	Disdikbud	1,10	1,1	0,00%				APBK	Disdikbud	
15	Pendidikan Kesetaraan	48,50		48,5	0,00%		-	APBN/ APBK/ OT SUS	Disdikbud	50,50		50,5	0,00%		-	APBK	Disdikbud	52,50	52,5	0,00%				APBK	Disdikbud	
3)	Angka partisipasi kasar	93,063		93,063	0,00%		-	APBK	Disdikbud	93,263		93,263	0,00%		-	APBK	Disdikbud					93,463			APBK	Disdikbud
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	93,063		93,063	0,00%		-	APBK	Disdikbud						-	APBK	Disdikbud					93,463			APBK	Disdikbud
6	Angka partisipasi murni literasi	93,063		93,063	0,00%		-		Disdikbud	93,263		93,263	0,00%		-	APBK	Disdikbud					93,463			APBK	Disdikbud
7	Kemampuan literasi	54,00		54	0,00%		-		Disdikbud	56,00		56	0,00%		-	APBK	Disdikbud			58,00		58	0,00%		APBK	Disdikbud
8	Kemampuan numerasi	49,00		49	0,00%		-		Disdikbud	51,00		51	0,00%		-	APBK	Disdikbud			53,00		53	0,00%		APBK	Disdikbud
9	Perbedaan skor literasi	0		0			-		Disdikbud	0		0			-	APBK	Disdikbud			0		0			APBK	Disdikbud
10	Perbedaan skor numerasi	74,00		74			-		Disdikbud	0		0			-	APBK	Disdikbud			0		0			APBK	Disdikbud

11	Indeks iklim keamanan	64,00		64			-		Disdikbud	76,00		76			-	APBK	Disdikbud			78,00		78	0,00%		Disdikbud
12	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	0	0				-		Disdikbud	66,00		66	0,00%				Disdikbud			68,00		68	0,00%		Disdikbud
13	Kecukupan formasi guru ASN	0	0				-		Disdikbud	0		0	0				Disdikbud			0		0	0		Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
14	Indeks distribusi guru	0		0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud
15	Proporsi PTK bersertifikat	0		0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud
16	Proporsi PTK penggerak	0		0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud
17	Pengalaman pelatihan guru	0		0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud	0	0	0			-	APBK	Disdikbud

3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Pidie 2023-2027

Tabel 3.9
RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN KABUPATEN PIDIE 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		Orang					162.000.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB					178.200.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	15.59 %	ampul	9268		1030			-	APBK/D AK	Dinkes& KB	9294					-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Tablet Tambah Darah	20.85 %	tablet	9268		834120			-	APBK/D AK	Dinkes& KB	9294					-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	58.27 %	Paket	9268		9268			-	APBK/D AK	Dinkes	9294					-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeriksaan Glukoprotein Urin	58.27 %	Paket	9268		9268			-	APBK/D AK	Dinkes	9294		9294			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	24.84 %	Paket	9268		9268			-	APBK/D AK	Dinkes	9294		9294			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	24.84 %	Buku	9268		9268			-	APBK/D AK	Dinkes	9294		9294			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Kunjungan K4		Orang	9268		9268			-	APBK/D AK	Dinkes	9294		9294			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Dokter/dokter spesialis kebidanan	32.95 %	Orang	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Bidan	100.00 %	Orang	1437		1437			-	APBK/D AK	Dinkes	1463		1463			-	APBK/D AK	Dinkes
10	Perawat	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes				115.502.556		-	APBK/D AK	Dinkes
1	Formulir Partograf	24.99 %	Formulir	8514		8514			-	APBK/D AK	Dinkes	8540		8540			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Kartu ibu (rekam medis)	26.02 %	Paket	8514		8514			-	APBK/D AK	Dinkes	8540		8540			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	26.02 %	Buku	8514		8514			-	APBK/D AK	Dinkes	8540		8540			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	32.95 %	Orang	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Bidan	100.00 %	Orang	1437		1437			-	APBK/D AK	Dinkes	1463		1463			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Perawat	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Vaksin Hepatitis BO	26.08 %	Vaksin	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	58		58			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Vitamin K1 Injeksi	26.08 %	Ampul	8095		8095			-	APBK/D AK	Dinkes	8121		8121			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	26.08 %	Orang	8095		8095			-	APBK/D AK	Dinkes	8121		8121			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Formulir Bayi Baru Lahir	26.08 %	Formulir	8095		8095			-	APBK/D AK	Dinkes	8121		8121			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	26.08 %	Orang	24285		24285			-	APBK/D AK	Dinkes	24311		24311			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	26.08 %	Buku	8095		8095			-	APBK/D AK	Dinkes	8121		8121			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Dokter/dokter spesialis Anak	32.95 %	Orang	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes	7		7			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Bidan	100.00 %	Orang	1437		1437			-	APBK/D AK	Dinkes	1463		1463			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Perawat	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	29.65 %	Dokumen	77578		77578			-	APBK/D AK	Dinkes	77604		77604			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	29.65 %	Formulir	77578		77578			-	APBK/D AK	Dinkes	77604		77604			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	29.65 %	Buku	38789		38789			-	APBK/D AK	Dinkes	38815		38815			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Vitamin A Biru	27.54 %	Kapsul	7901		7901			-	APBK/D AK	Dinkes	7927		7927			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Vitamin A Merah	29.65 %	Kapsul	30872		30872			-	APBK/D AK	Dinkes	30898		30898			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	0.72 %	Vaksin	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	52		52			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	89.23 %	Vaksin	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	58		58			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	HBo		Vaksin						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
	BCG		Vaksin						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
	Polio		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
	IPV		Vaksin						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
	DPT-HB-Hib		Vaksin						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
	Campak - Rubella		Vaksin						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	15.42 %	Unit	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	58		58			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Peralatan Anafilaktik	0 %	Paket	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	58		58			-	APBK/D AK	Dinkes
10	Bidan	100.00 %	Orang	1437		1437			-	APBK/D AK	Dinkes	1463		1463			-	APBK/D AK	Dinkes
11	Dokter	32.95 %	Orang	72		72			-	APBK/D AK	Dinkes	72		72			-	APBK/D AK	Dinkes
12	Perawat	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
13	Ahli Gizi	7.73 %	Orang	13		13			-	APBK/D AK	Dinkes	39		39			-	APBK/D AK	Dinkes
14	Guru PAUD	17.99 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
15	Kader Kesehatan	100.00 %	Orang	3875		3875			-	APBK/D AK	Dinkes	3875		3875			-	APBK/D AK	Dinkes
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Buku Raport Sehatanku	3.88 %	Buku	17702		17702			-	APBK/D AK	Dinkes	17728		17728			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Buku Pemantauan Kesehatan	0 %	Buku	80909		80909			-	APBK/D AK	Dinkes	80935		80935			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	2.31 %	Dokumen	72296		72296			-	APBK/D AK	Dinkes	72322		72322			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1.12 %	Dokumen	449		449			-	APBK/D AK	Dinkes	449		449			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	8.27 %	Formulir	495		495			-	APBK/D AK	Dinkes	521		521			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Dokter/Dokter gigi	52.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Bidan	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Perawat	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Ahli Gizi	7.73 %	Orang	13		13			-	APBK/D AK	Dinkes	13		13			-	APBK/D AK	Dinkes
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
11	Guru	83.23 %	Orang	449		449			-	APBK/D AK	Dinkes	449		449			-	APBK/D AK	Dinkes
12	Kader Kesehatan	100.00 %	Orang	130		130			-	APBK/D AK	Dinkes	130		130			-	APBK/D AK	Dinkes
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100.00 %	Pedoman	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	100.00 %	Unit	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100.00 %	Dokumen	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Dokter	32.95 %	Orang	27		71			-	APBK/D AK	Dinkes	27		71			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Bidan	100.00 %	Orang	27		1481			-	APBK/D AK	Dinkes	27		1481			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Perawat	100.00 %	Orang	26		984			-	APBK/D AK	Dinkes	26		984			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Ahli Gizi	7.73 %	Orang	27		55			-	APBK/D AK	Dinkes	27		55			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100.00 %	Orang	28		195			-	APBK/D AK	Dinkes	28		195			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	100.00 %	Orang	730		775			-	APBK/D AK	Dinkes	730		775			-	APBK/D AK	Dinkes
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	3.48 %	Paket	0		26			-	APBK/D AK	Dinkes	0		26			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	25.02 %	Paket	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Buku Kesehatan Lansia	0 %	Buku	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Dokter	32.95 %	Orang	24		24			-	APBK/D AK	Dinkes	24		24			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Bidan	100.00 %	Orang	2		2			-	APBK/D AK	Dinkes	2		2			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Perawat	100.00 %	Orang	2		2			-	APBK/D AK	Dinkes	2		2			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Ahli Gizi	7.73 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	100.00 %	Orang	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes	0		0			-	APBK/D AK	Dinkes
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100.00 %	Pedoman	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Tensimeter	100.00 %	Unit	54		54			-	APBK/D AK	Dinkes	54		54			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100.00 %	Dokumen	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Dokter	32.95 %	Orang	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Bidan	100.00 %	Orang	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Perawat	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100.00 %	Orang	28		28			-	APBK/D AK	Dinkes	28		28			-	APBK/D AK	Dinkes
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Glukometer	100.00 %	Unit	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	100.00 %	Unit	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100.00 %	Pedoman	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes	30		30			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Dokter	32.95 %	Orang	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Bidan	100.00 %	Orang	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes
6	Perawat	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Ahli Gizi	7.73 %	Orang	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes	27		27			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	100.00 %	Orang	28		28			-	APBK/D AK	Dinkes	28		28			-	APBK/D AK	Dinkes
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/D AK	Dinkes
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	100.00 %	Buku	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	100.00 %	Paket	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100.00 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	32.95 %	Orang	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Orang							APBK/D AK	Dinkes							APBK/DAK	Dinkes
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	100.00 %	Media	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Reagen Zn TB	5.87 %	Paket	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	28.31 %	Paket	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	28.31 %	Paket	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Catridge tes cepat molekuler	19.81 %	Paket	3		3			-	APBK/D AK	Dinkes	3		3			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	100.00 %	Dokumen	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	100.00 %	Dokumen	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	32.95 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Perawat	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	31.25 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
11	Penata Rontgen	68.57 %	Orang	5		5			-	APBK/D AK	Dinkes	5		5			-	APBK/DAK	Dinkes
12	Tenaga kesehatan masyarakat	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Orang						-	APBK/D AK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100.00 %	Media	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	30.28 %	Paket	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	30.28 %	Paket	28		28			-	APBK/D AK	Dinkes	28		28			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	30.28 %	Paket	26		26			-	APBK/D AK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	32.95 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Perawat	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes
7	Bidan	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	31.25 %	Orang	31		31			-	APBK/D AK	Dinkes	31		31			-	APBK/D AK	Dinkes
9	Tenaga kesehatan masyarakat	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100.00 %	Orang	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes	32		32			-	APBK/D AK	Dinkes

Lanjutan Tabel 3.9

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Kabupaten /Kota																								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil						-	APBK/ DAK	Dinkes						-	APBK/ DAK	Dinkes						-	APBK/ DAK	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	9294		9294			-	APBK/ DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/ DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/ DAK	Dinkes
2	Tablet Tambah Darah	9294		9294			-	APBK/ DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/ DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/ DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Kunjungan K4	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes	9320		9320			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Dokter/dokter spesialis kebidanan	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Bidan	1463		1463			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes
10	Perawat	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					115.502.556	-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-		
1	Formulir Partograf	8540		8540			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Kartu ibu (rekam medis)	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes	8566		8566			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Bidan	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
1	Vaksin Hepatitis BO	1463		1463			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Vitamin K1 Injeksi	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik						-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Formulir Bayi Baru Lahir	8540		8540			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	24337		24337			-	APBK/DAK	Dinkes	24337		24337			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9294		9294			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes	8147		8147			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Lay a nan	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Dokter/dokter spesialis Anak	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes	7		7			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Bidan	1463		1463			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Perawat	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes
4)	Pelayanan Kesehatan Balita						-	APBK/DAK	Dinkes &KB						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	77604		77604			-	APBK/DAK	Dinkes	77630		77630			-	APBK/DAK	Dinkes	77630		77630			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	77604		77604			-	APBK/DAK	Dinkes	77630		77630			-	APBK/DAK	Dinkes	77630		77630			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	38815		38815			-	APBK/DAK	Dinkes	38841		38841			-	APBK/DAK	Dinkes	38841		38841			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Vitamin A Biru	7927		7927			-	APBK/DAK	Dinkes	7953		7953			-	APBK/DAK	Dinkes	7953		7953			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Vitamin A Merah	30898		30898			-	APBK/DAK	Dinkes	30924		30924			-	APBK/DAK	Dinkes	30924		30924			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB - Hib, Campak, Rubella	58					-	APBK/DAK	Dinkes	84					-	APBK/DAK	Dinkes &KB						-	APBK/DAK	Dinkes
	HBo						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
	BCG						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
	Polio						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
	IPV						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
	DPT-HB-Hib						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
	Campak - Rubella						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	58		58			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Peralatan Anafilaktik	58		58			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes	84		84			-	APBK/DAK	Dinkes
10	Bidan	1463		1463			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes	1489		1489			-	APBK/DAK	Dinkes
11	Dokter	72		72			-	APBK/DAK	Dinkes	72		72			-	APBK/DAK	Dinkes	72		72			-	APBK/DAK	Dinkes
12	Perawat	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes
13	Ahli Gizi	39		39			-	APBK/DAK	Dinkes	65		65			-	APBK/DAK	Dinkes	65		65			-	APBK/DAK	Dinkes
14	Guru PAUD	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes	0		0			-	APBK/DAK	Dinkes

1 5	Kader Kesehatan	3875		3875			-	APBK/ DAK	Dinkes	3875		3875			-	APBK/ DAK	Dinkes	3875		3875			-	APBK/ DAK	Dinkes
--------	--------------------	------	--	------	--	--	---	--------------	--------	------	--	------	--	--	---	--------------	--------	------	--	------	--	--	---	--------------	--------

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK	Dinkes
1	Buku Raport Kesehatananku	17728		17728			-	APBK/DAK	Dinkes	17754		17754			-	APBK/DAK	Dinkes	17754		17754			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Buku Pemantauan Kesehatan	80935		80935			-	APBK/DAK	Dinkes	80961		80961			-	APBK/DAK	Dinkes	80961		80961			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	72322		72322			-	APBK/DAK	Dinkes	72348		72348			-	APBK/DAK	Dinkes	72348		72348			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	449		449			-	APBK/DAK	Dinkes	449		449			-	APBK/DAK	Dinkes	449		449			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	521		521			-	APBK/DAK	Dinkes	547		547			-	APBK/DAK	Dinkes	547		547			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Dokter/Dokter gigi	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Bidan	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Lay a nan	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
8	Perawat	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes
9	Ahli Gizi	13		13			-	APBK/ DAK	Dinkes	13		13			-	APBK/ DAK	Dinkes	13		13			-	APBK/ DAK	Dinkes
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes
11	Guru	449		449			-	APBK/ DAK	Dinkes	449		449			-	APBK/ DAK	Dinkes	449		449			-	APBK/ DAK	Dinkes
12	Kader Kesehatan	130		130			-	APBK/ DAK	Dinkes	130		130			-	APBK/ DAK	Dinkes	130		130			-	APBK/ DAK	Dinkes
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						-	APBK/ DAK	Dinkes						-	APBK/ DAK	Dinkes						-	APBK	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Dokter	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Bidan	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Ahli Gizi	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes							APBK	Dinkes
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	1631		1631			-	APBK/DAK	Dinkes	1631		1631			-	APBK/DAK	Dinkes	1631		1631			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	8925		8925			-	APBK/DAK	Dinkes	8925		8925			-	APBK/DAK	Dinkes	8925		8925			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Buku Kesehatan Lansia	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Dokter	119		119			-	APBK/DAK	Dinkes	119		119			-	APBK/DAK	Dinkes	119		119			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Bidan	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Ahli Gizi	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes	54		54			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Tensimeter	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Dokter	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Bidan	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes							APBK	Dinkes
1	Glukometer	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Dokter	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes	114		114			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Bidan	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Ahli Gizi	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes	220		220			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						-	APBK/DAK	Dinkes							APBK	Dinkes							APBK	Dinkes

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Lay a nan	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes	52		52			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	338		338			-	APBK/DAK	Dinkes	338		338			-	APBK/DAK	Dinkes	338		338			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	104		104			-	APBK/DAK	Dinkes	104		104			-	APBK/DAK	Dinkes	104		104			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							APBK/DAK	Dinkes							APBK/DAK	Dinkes							APBK/DAK	Dinkes
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes
2	Reagen Zn TB	1490		1490			-	APBK/DAK	Dinkes	1490		1490			-	APBK/DAK	Dinkes	1490		1490			-	APBK/DAK	Dinkes
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes	7452		7452			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Catridge tes cepat molekuler	5962		5962			-	APBK/DAK	Dinkes	5962		5962			-	APBK/DAK	Dinkes	5962		5962			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksana
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Lay a nan	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Pedoman/S tandar Operasiona l Prosedur	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/ DAK	Dinkes
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	119		119			-	APBK/ DAK	Dinkes	119		119			-	APBK/ DAK	Dinkes	119		119			-	APBK/ DAK	Dinkes
9	Perawat	724		724			-	APBK/ DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/ DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/ DAK	Dinkes
10	Analisis Teknik Laboratoriu m Medik (ATLM)	64		64			-	APBK/ DAK	Dinkes	64		64			-	APBK/ DAK	Dinkes	64		64			-	APBK/ DAK	Dinkes
11	Penata Rontgen	35		35			-	APBK/ DAK	Dinkes	35		35			-	APBK/ DAK	Dinkes	35		35			-	APBK/ DAK	Dinkes
12	Tenaga kesehatan masyarakat	73		73			-	APBK/ DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/ DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/ DAK	Dinkes
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	3890		3890			-	APBK/ DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/ DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/ DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 2)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						-	APBK/DAK	Dinkes						-	APBK/DAK	Dinkes							-	APBK/DAK	Dinkes
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26			-	APBK/DAK	Dinkes	26		26				-	APBK/DAK	Dinkes
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	7042		7042			-	APBK/DAK	Dinkes	7042		7042			-	APBK/DAK	Dinkes	7042		7042				-	APBK/DAK	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	9270		9270			-	APBK/DAK	Dinkes	9270		9270			-	APBK/DAK	Dinkes	9270			9270			-	APBK/DAK	Dinkes
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440		440			-	APBK/DAK	Dinkes	440			440			-	APBK/DAK	Dinkes
6	Perawat	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724		724			-	APBK/DAK	Dinkes	724			724			-	APBK/DAK	Dinkes
7	Bidan	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344		344			-	APBK/DAK	Dinkes	344			344			-	APBK/DAK	Dinkes
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	64		64			-	APBK/DAK	Dinkes	64		64			-	APBK/DAK	Dinkes	64			64			-	APBK/DAK	Dinkes
9	Tenaga kesehatan masyarakat	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73		73			-	APBK/DAK	Dinkes	73			73			-	APBK/DAK	Dinkes
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890		3890			-	APBK/DAK	Dinkes	3890			3890			-	APBK/DAK	Dinkes

3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabuten Pidie 2023-2027

Tabel 3.10

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari								-	DAK	PERKIM						-	DAK	PERKIM
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		Sambungan Rumah (SR)	800		800			-	DAK	PERKIM	1000		1000			-	DAK	PERKIM
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)		Sambungan Rumah (SR)	800		800			-	DAK	PERKIM	1000		1000			-	DAK	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		Rumah Tangga	0	0				-	-		0		0			-	APBK	PERKIM
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)		Rumah Tangga	0	0				-	-		0		0			-	APBK	PERKIM
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic			0	0				-	APBK, DAK, OTSUS	PERKIM	0		0			-	APBK, DAK, OTSUS	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		Sambungan Rumah (SR)	0					-	DAK/OTSUS	PUPR	0		0			-	DAK/OTSUS	PERKIM
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)		Sambungan Rumah (SR)	882		0	0	-	-	-		0		0			-		PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		Sambungan Rumah (SR)	0		0	0		-	APBK	PERKIM			0	0		-	APBK	PERKIM
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		Sambungan Rumah (SR)	0		0	0		-	DAK	PERKIM			0	0		-	DAK	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		Sambungan Rumah (SR)	0		0	0	-	-	APBK	PERKIM			0	0	-	-	-	PERKIM

Lanjutan Tabel 3.10

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	Kabupaten/Kota																									
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari						-	APBK/DAK	PERKIM						-	APBK/DAK	PERKIM							-	APBK/DAK	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM	1000		1000			-	APBK/DAK	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0		0			-	APBK	PERKIM	0		0			-	APBK/DAK	PERKIM	0		0			-	APBK/DAK	PERKIM
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	0		0			-	APBK	PERKIM	0		0			-	APBK/DAK	PERKIM	0		0			-	APBK/DAK	PERKIM
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						-	APBK,DAK,OTSUS	PERKIM						-	APBK,DAK,OTSUS	PERKIM						-	APBK,DAK,OTSUS	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	0					-	DAK	PERKIM	0					-	DAK	PERKIM	0					-	DAK/OTSUS	PERKIM
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	1000		0	0		-			1000		0	0		-			1000		0	0		-		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	100					-	APBK	PERKIM	100					-	APBK	PERKIM	100						-	APBK	PERKIM
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	0					-	DAK	PERKIM	0					-	DAK	PERKIM	0						-	DAK	PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0							PERKIM	0						PERKIM	0								PERKIM

3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pidie 2023-2027

Tabel 3.11

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT Kabupaten Pidie 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang	140	140			2,759,998,086	-	APBK	PUPR	225	225			4,409,998,086	-	APBK	PUPR

		Dasar								Dasar							Dasar		n								
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	Kabupaten/Kota																										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM							-	APBK	PERKIM	
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM							-	APBK	PERKIM	
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM							-	APBK	PERKIM	
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana					Rp 210.000.00 20,00	-	APBK	PERKIM					Rp 210.000.00 20,00	-	APBK	PERKIM							Rp 220.000.00 20,00	-	APBK	PERKIM
		2	2	2						2	2	2						2	2	2							
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM							-	APBK	PERKIM	
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								PERKIM								PERKIM									PERKIM	
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM							-	APBK	PERKIM	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran							
																										Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
																										Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM				
2	Subsidi uang sewa						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM						-	APBK	PERKIM				
3	Penyediaan rumah layak huni	5	5	5	50,00	Rp 525.000.00	-	APBK	PERKIM	5	5	5	50,00	Rp 525.000.00	-	APBK	PERKIM	5	5	5	50,00	Rp 550.000.00	-	APBK	PERKIM				

3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pidie 2023-2027

Tabel 3.12

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		Orang							APBK	Satpol PP dan WH						-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	12	Unit	1	1	1	100%	2.980.000	-	APBK	Satpol PP dan WH	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3.039.600	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	4	Dokumen	4	3	3	3	585.922.686	-	APBK	Satpol PP dan WH	3	3	3	100%	597.641.140	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	1	Orang	1	1	1	100%	1.756.800.000	-	-	Satpol PP dan WH	452	452	452	100%	1756800000	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0	Dokumen	0	0	0	0		-	-	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	orang	0	0	0	0		-	-	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	orang	0	0	0	0		-	-	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	Satpol PP dan WH	APBK	Satpol PP dan WH
2)	Kebencanaan																		
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		Orang						-	APBK/DAK	BPBD						-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Dokumen	1	1	1	1	-	-	APBA	BPBD	1	-	1	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	190.027	Orang	290.717	290.717	290.717	100%	-	-	-	BPBD	295.717	-	295.717	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	200 orang	-	200 orang	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	-	-	-	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Orang						-	APBK/DAK	BPBD						-	APBK/DAK	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	30	Unit	30	30	30	100%	177.480.386	-	APBK/DAK	BPBD	30 Unit	-	30 Unit	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	20	Orang	45	45	45	100%	177.480.386	-	APBK/DAK	BPBD	45 orang	-	45 orang	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Orang						-	APBK/DAK	BPBD						-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	4	Posko	5	4	5	86%	98.314.618	-	APBK	BPBD	5	-	5	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	190.027	Orang	500	6.478	50	100%	1.97.403.941	-	-	-	500 orang	-	500 orang	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	4	Dokumen	2	2	2	100%	98.314.618	-	-	-	2	-	2	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	-	layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	4	layanan	2	2	2	100%		-	-	-	2	-	2	-	-	BPBD Pidie	APBK/DAK	BPBD
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		Orang							APBK/DAK	BPBD							APBK/DAK	BPBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	5	layanan	5	5	5	100%	2.223.994.705	-	APBK	BPBD	5	-	5	-	-	BPBD Pidie	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	0	Dokumen	1	0	1	0		-	APBK	BPBD	1	-	1	-	-		APBK	BPBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	11	unit	11	11	11	100%	2.223.994.705	-	APBK	BPBD	11	-	11	-	-	BPBD Pidie	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	86	orang	85	85	85	100%	2.223.994.705	-	APBK	BPBD	85	-	85	-	-	BPBD Pidie	APBK	BPBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	124	layanan	150	109	150	73%	2.223.994.705	-	APBK	BPBD	150	-	150	-	-	BPBD Pidie	APBK	BPBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0	layanan	1	1	1	100%	2.223.994.705	-	APBK	BPBD	2	-	2	-	-	BPBD Pidie	APBK	BPBD

Lanjutan Tabel 3.12

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Kabupaten/Kota																								
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)						-	APBK	Satpol PP dan WH						-	APBK	Satpol PP dan WH						-	APBK	Satpol PP dan WH
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	1	100%	1 Unit	100%	3.100.392	-	APBK	Satpol PP dan WH	1 Unit	100%	1 Unit	100%	3.162.400	-	APBK	Satpol PP dan WH	1 Unit	100%	1 Unit	100%	3.225.648	-	APBK	Satpol PP dan WH
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	3	100%	3	100%	609.593.963	-	APBK	Satpol PP dan WH	3	100%	3	100%	621.785.842	-	APBK	Satpol PP dan WH	3	100%	3	100%	634.221.559	-	APBK	Satpol PP dan WH
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	452	100%	452	100%	1.756.800.000	-	APBK	Satpol PP dan WH	452	100%	452	100%	1.756.800.000	-	APBK	Satpol PP dan WH	452	100%	452	100%	1.756.800.000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	1	0	1	0	0	-	APBK	Satpol PP dan WH	
2)	Kebencanaan																									
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)						-	APBK /DAK	BPBD						-	APBK /DAK	BPBD						-	APEK /DAK	BPBD	
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	-	1	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	1	-	1	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	1	-	1	-	-	-	-	APEK /DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	300.717	-	300.717	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	305.717	-	305.717	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	305.717	-	305.717	-	-	-	APBK /DAK	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	200	-	200	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	200 orang	-	200 orang	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	200 orang	-	200 orang	-	-	-	APBK /DAK	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3000	3000	-	-	1,047,698,252	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	35 Unit	-	35 Unit	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	35 Unit	-	35 Unit	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	35 Unit	-	35 Unit	-	-	-	APBK /DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	50	-	50	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	50 orang	-	50 orang	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	50 orang	-	50 orang	50 orang	-	-	APEK /DAK	BPBD
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						-	APBK /DAK	BPBD						-	APBK /DAK	BPBD						-	APEK /DAK	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	5	-	5	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	5	-	5	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	5	-	5	-	-	-	APEK /DAK	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	500	-	500	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	500 orang	-	500 orang	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	500 orang	-	500 orang	-	-	-	APEK /DAK	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	-	2	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	2	-	2	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	2	-	2	-	-	-	APEK /DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APEK /DAK	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	2	-	2	-	2	-	APBK /DAK	BPBD	2	-	2	-	-	-	APEK /DAK	BPBD
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APBK /DAK	BPBD	-	-	-	-	-	-	APEK /DAK	BPBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	5	-	5	-	-	-	APBK	BPBD	5	-	5	-	-	-	APBK	BPBD	5	-	5	-	-	-	APEK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	-	1	-	-	-	APBK	BPBD	1	-	1	-	-	-	APBK	BPBD	1	-	1	-	-	-	APBK	BPBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	11	-	11	-	-	-	APBK	BPBD	11	-	11	-	-	-	APBK	BPBD	11	-	11	-	-	-	APBK	BPBD
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	85	-	85	-	-	-	APBK	BPBD	85	-	85	-	-	-	APBK	BPBD	85	-	85	-	-	-	APBK	BPBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	150	-	150	-	-	-	APBK	BPBD	150	-	150	-	-	-	APBK	BPBD	150	-	150	-	-	-	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2	-	2	-	-	-	APBK	BPBD	2	-	2	-	-	-	APBK	BPBD	2	-	2	-	-	-	APBK	BPBD

3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Urusan Sosial Kabupaten Pidie 2023-2027

Tabel 3.13
RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL KABUPATEN PIDIE 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		Orang					176.942.379		DAU	Dinsos,					180.289.888		DAU	Dinsos,
1	Layanan data dan pengaduan	2	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos,

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	2	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	625	Orang	293	293	100	100	22.309.395	-	DAU	Dinsos	323	323	100	100	-	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan alat bantu	250	Orang	100	100	100	100	110.998.813	-	-	Dinsos	110	110	100	100	-	-	DAU	Dinsos
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	21	Orang	10	10	100	100	33.484.171	-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100	Orang	10	10	100	100	10.150.000	-	-	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	Orang	10	10	100	100		-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	Orang	10	10	100	100		-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
13	Layanan rujukan	2	Orang	15	15	100	100		-	-	Dinsos	17	17	100	100	-	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		orang					65.943.566		DAU	Dinsos					180.289.888	-	DAU	Dinsos
1	Layanan data dan pengaduan	2	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	2	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	2	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	625	orang	293	293	100	100	22.309.395	-	DAU	Dinsos	323	323	100	100	-	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	250	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	2	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	21	orang	10	10	100	100	33.484.171	-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100	orang	10	10	100	100	10.150.000	-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Layanan rujukan	2	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		Orang						-	DAU	Dinsos					180.289.888	-	DAU	Dinsos
1	Layanan data dan pengaduan	0	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	625	Orang	293	293	100	100	22.309.395	-	DAU	Dinsos	323	323	100	100	-	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan alat bantu	250	Orang	100	100	100	100	110.998.813	-	-	Dinsos	110	110	100	100	-	-	DAU	Dinsos
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	Orang	25	25	100	100		-	DAU	Dinsos	28	28	100	100	-	-	DAU	Dinsos
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	21	Orang	10	10	100	100	33.484.171	-	DAU	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	100	Orang	10	10	100	100	10.150.000	-	-	Dinsos	11	11	100	100	-	-	DAU	Dinsos
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
13	Layanan rujukan	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Orang					322.222.128	-	DAU	Dinsos					678.527.989	-	DAU	Dinsos
1	Layanan data dan pengaduan	0	orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	625	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	250	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	0	Orang	30	30	100	100	122.224.069	-	DAU	Dinsos	33	33	100	100	-	-	DAU	Dinsos
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	21	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	Orang	5	5	100	100		-	-	-	6	6	100	100	-	-	DAU	
10	Pemberian pelayanan penclusuran keluarga	0	Orang	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos
12	Layanan rujukan	0	Orang	4.600	4.600	100	100	199.998.059	-	DAU	Dinsos	5.060	5.060	100	100	-	-	DAU	Dinsos
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang	835	835	100	100	113.088.380	-	APBA	Dinsos					649.995.320	-	APBA / APEBK	Dinsos
1	Penyediaan permakanan	290	Orang	800	800	100	100	100.997.939	-	APBA	Dinsos	880	880	100	100		-	APBA / APEBK	Dinsos
2	Penyediaan sandang	20	Orang	20	20	100	100	12.090.441	-	APBA	Dinsos	22	22	100	100		-	APBA / APEBK	Dinsos
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	20	Unit	5	5	100	100		-	-	Dinsos	6	6	100	100		-	-	Dinsos
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	Orang	5	5	100	100		-	APBA	Dinsos	6	6	100	100		-	APBA / APEBK	Dinsos
5	Pelayanan dukungan Psikososial	0	Orang	5	5	100	100		-	DAU	Dinsos	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos

Lanjutan Tabel 3. 13

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	Kabupaten/ Kota																									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos	66	66	100	100		-	-	DAU	Dinsos	109	109		91,975,000	-	DAU	Dinsos	
1	Layanan data dan pengaduan	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos	66	66	100	100		-	-	DAU	Dinsos			40	45	3,500,000	-	DAU	Dinsos
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos	66	66	100	100		-	-	DAU	Dinsos			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanaan	355	355	100	100		-	DAU	Dinsos	355	355	100	100		-	-	DAU	Dinsos			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	121	121	100	100		-	DAU	Dinsos	121	121	100	100		-	-	DAU	Dinsos			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan alat bantu	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos	66	66	100	100		-	-	DAU	Dinsos			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos	66	66	100	100		-	-	DAU	Dinsos			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	12	12	100	100		-	DAU	Dinsos	12	12	100	100		-	-	DAU	Dinsos			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	12	12	100	100		-	DAU	Dinsos	12	12	100	100		-	-	DAU	Dinsos			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	12	12	100	100	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	6	100	100	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	12	12	100	100	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	100	100	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	
13	Layanan rujukan	18	18	100	100	-	DAU	Dinsos	18	18	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	18	18	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	-	-	-	-	-	DAU	Dinsos	-	-	-	-	40,275,000	-	DAU	Dinsos	-	-	-	-	40,275,000	-	DAU	Dinsos	
1	Layanan data dan pengaduan	6	6	100	100	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	1,500,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	1,500,000	-	DAU	Dinsos	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	6	6	100	100	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Penyediaan permakanaan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	525,000		DAU	Dinsos	6	6	100	100	525,000	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	355	355	100	100	-	-	DAU	Dinsos	355	355	100	100	750,000		DAU	Dinsos	355	355	100	100	750,000	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000		DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000		DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	1,200,000		DAU	Dinsos	12	12	100	100	1,200,000	-	DAU	Dinsos
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	600,000		DAU	Dinsos	12	12	100	100	600,000	-	DAU	Dinsos
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	200,000		DAU	Dinsos	6	6	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
12	Layanan rujukan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						-	DAU	Dinsos					91,475,000	-	DAU	Dinsos					91,975,000	-	DAU	Dinsos
1	Layanan data dan pengaduan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	3,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	3,500,000	-	DAU	Dinsos
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	525,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	525,000	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	355	355	100	100	-	-	DAU	Dinsos	355	355	100	100	750,000	-	DAU	Dinsos	355	355	100	100	750,000	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan alat bantu	121	121	100	100	-	-	DAU	Dinsos	121	121	100	100	40,000,000	-	DAU	Dinsos	121	121	100	100	40,000,000	-	DAU	Dinsos
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	100	100	-	-	DAU	Dinsos	30	30	100	100	1,200,000	-	DAU	Dinsos	30	30	100	100	1,200,000	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	12	12	100	100	600,000	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	600,000	-	DAU	Dinsos
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	12	12	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	12	12	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos	12	12	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
13	Layanan rujukan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						-	DAU	Dinsos,					41,775,000	-	DAU	Dinsos					42,275,000	-	DAU	Dinsos
1	Layanan data dan pengaduan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	3,000,000	-	DAU	Dinsos	6	6	100	100	3,500,000	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	14,400,000	-	DAU	Dinsos
3	Penyediaan permakanan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	525,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	525,000	-	DAU	Dinsos
4	Penyediaan sandang	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	750,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	750,000	-	DAU	Dinsos
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	300,000	-	DAU	Dinsos
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	33	33	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	33	33	100	100	1,200,000	-	DAU	Dinsos,	33	33	100	100	1,200,000	-	DAU	Dinsos
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	600,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	600,000	-	DAU	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	200,000	-	DAU	Dinsos
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	500,000	-	DAU	Dinsos
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
12	Layanan rujukan	5.060	5.060	100	100	-	-	DAU	Dinsos,	5.060	5.060	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos,	5.060	5.060	100	100	10,000,000	-	DAU	Dinsos
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	919	919	100	100	649.995.320	-	DAU	Dinsos,	919	919	100	100	350,000,000	-	DAU	Dinsos,	919	919	100	100	350,000,000	-	DAU	Dinsos
1	Penyediaan permakanan	880	880	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	880	880	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	880	880	100	100	-	-	APBA	Dinsos
2	Penyediaan sandang	22	22	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	22	22	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	22	22	100	100	-	-	APBA	Dinsos
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	6	6	100	100	-	-	-	-	6	6	100	100	-	-	-	-	6	6	100	100	-	-	-	-
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	6	6	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	6	6	100	100	-	-	APBA	Dinsos,	6	6	100	100	-	-	APBA	Dinsos

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Pelayanan dukungan Psikososial	6	6	100	100		-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	350,000,000	-	DAU	Dinsos,	6	6	100	100	350,000,000		DAU	Dinsos

3.3 Integrasi SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang- Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJP, RPJM, RKPK, RENSTRA SKPK sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPK dan RKA SKPK. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar

dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, RENSTRA, RKPK, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBK yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBK (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBK.

3.3.1. Integrasi Penerapan SPM Terhadap Dokumen Rencana Daerah

TABEL 3. 14
Urusan Pendidikan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program SPM Pendidikan anak Usia Dini	Angka Partisipasi sekolah PAUD	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan unit sekolah baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan ruang kelas baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Literasi dan rumenerasi PAUD	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Kualitas PAUD	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pertumbuhan pendidikan PAUD dengan S1/DIV	Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Angka partisipasi Sekolah (SD/SMP)	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan unit sekolah baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan ruang kelas baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Literasi dan numerasi (SD/SMP)	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Iklim (SD/SMP)	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan unit sekolah baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan ruang kelas baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Iklim (Kesetaraan)	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.15 Urusan Kesehatan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.16 Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

			dan Prasarana IPLT						
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

			Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayahul hisbah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis bagi polisi wilayahul hisbah aceh dan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program Penanggulangan	Pelayanan Informasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	Bencana	Rawan Bencana Kabupaten/ K ota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
--	---------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada				Bencana ...

			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		Penyelenggara an operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.19
Urusan Sosial

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
	Program Rehabilitas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Sandang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Alat Bantu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Rujukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Sandang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan

media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pidie, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai

- untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing- masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya

semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Wali Kota. Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?
 3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Pidie masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Pidie.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Pidie berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Pidie secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, Semoga bermanfaat untuk percepatan, penerapan dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM di Kabupaten Pidie

BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH